

PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN BOGOR

(The Role of Culture and Tourism Agency of Bogor District in Ecotourism Development)

TRI RAHAYUNINGSIH¹⁾ DAN E.K.S. HARINI MUNTASIB²⁾

¹⁾ *Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB
PO Box 168, Bogor 1600, Indonesia*

²⁾ *Bagian Rekreasi Alam dan Ekowisata, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
Fakultas Kehutanan IPB, PO Box 168, Bogor 1600, Indonesia*

Diterima 25 Oktober 2011/Disetujui 24 April 2012

ABSTRACT

Bogor district have a good potential of ecotourism, but recently only a few sites were developed and known by community. One of the keys to success is active participation of the stakeholders involved, particularly the Culture and Tourism Agency (CTA) of Bogor District, in introducing and offering the existing ecotourism potential. This research was conducted to identify the role of CTA of Bogor District in the development of ecotourism in Bogor. Data on action taken and policy issued by the CTA were collected through participative observation and in-depth interview using interview guidance. The result showed that the Agency had actively participated in the ecotourism development of Bogor District, and built cooperation or partnership with various stakeholders. However, the Agency's policy should be synchronized with the policy of other stakeholder in the ecotourism development of Bogor District.

Keyword: Department of Culture and Tourism - Bogor district, Role, Development, Ecotourism.

ABSTRAK

Kabupaten Bogor memiliki potensi ekowisata yang tinggi, namun saat ini hanya beberapa lokasi yang telah dikembangkan dan dikenal oleh masyarakat. Salah satu penentu keberhasilan adalah peran aktif para pihak, antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor, dalam memperkenalkan dan menawarkan potensi ekowisata yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi peran Disbudpar Kabupaten Bogor dalam pengembangan ekowisata Bogor. Data mengenai kegiatan yang telah dilakukan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Disbudpar Kabupaten Bogor didapatkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan panduan wawancara. Disbudpar Kabupaten Bogor didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah melakukan peran-aktif untuk mengembangkan ekowisata Kabupaten Bogor pada khususnya, serta menjalin kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak. Langkah-langkah/kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor harus disinergikan dengan langkah-langkah/kebijakan dari instansi (stakeholder) lain dalam upaya pengembangan ekowisata Kabupaten Bogor.

Kata kunci: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata – Kabupaten Bogor, Peran, Pengembangan, Ekowisata.

PENDAHULUAN

Pariwisata memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia karena didukung oleh kekayaan alam, keanekaragaman hayati flora dan fauna, peninggalan sejarah serta keanekaragaman budaya. Semua kekayaan tersebut merupakan potensi wisata yang sangat besar. Sebagai negara kepulauan, maka potensi wisata tersebut menyebar hampir di seluruh wilayah nusantara Indonesia. Kegiatan pariwisata yang umum berkembang di Indonesia adalah kegiatan wisata alam.

Kabupaten Bogor mempunyai potensi ekowisata yang cukup besar, namun sampai saat ini baru beberapa lokasi yang dikembangkan dan diketahui oleh masyarakat. Padahal lokasi wisata alam di Kabupaten Bogor tersebut sebenarnya tersebar di hampir semua wilayah seperti wilayah Puncak, Bogor Barat, Bogor Timur dan Bogor Utara. Wilayah Bogor yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat sebagai lokasi wisata adalah Puncak, sedangkan lokasi yang lain belum dikenal luas bahkan ada yang belum dikenal sama sekali.

Besarnya potensi wisata di Kabupaten Bogor tersebut sebenarnya menjadi peluang yang besar pula bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk dapat mengembangkannya sebagai modal pembangunan dalam meningkatkan ekonomi daerahnya. Salah satu faktor penentunya adalah keterlibatan atau peran aktif dari berbagai pihak, terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor sebagai unit organisasi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan pembangunan pariwisata daerah. Pertanyaannya, seberapa jauh peran yang dimainkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor di dalam pengembangan ekowisata dan bagaimana permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata tersebut di Kabupaten Bogor. Berdasarkan pemikiran itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: (1) untuk mengetahui peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor didalam pengembangan ekowisata, dan (2) permasalahan dan kendala pengembangan ekowisata di Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bogor selama 2 (dua) bulan, Juli sampai Agustus 2011. Peralatan yang digunakan adalah panduan wawancara semi terstruktur, perekam audio, alat tulis, dan kamera digital.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder mengenai langkah-langkah dan kebijakan apa saja yang telah diambil oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dalam upaya mengembangkan ekowisata di Kabupaten Bogor. Data dikumpulkan secara langsung dari responden melalui observasi partisipasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan panduan pertanyaan. Data yang terkumpulkan dianalisis secara deskriptif mengenai langkah-langkah dan kebijakan pengembangan ekowisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogo, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN

Peran dan Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor

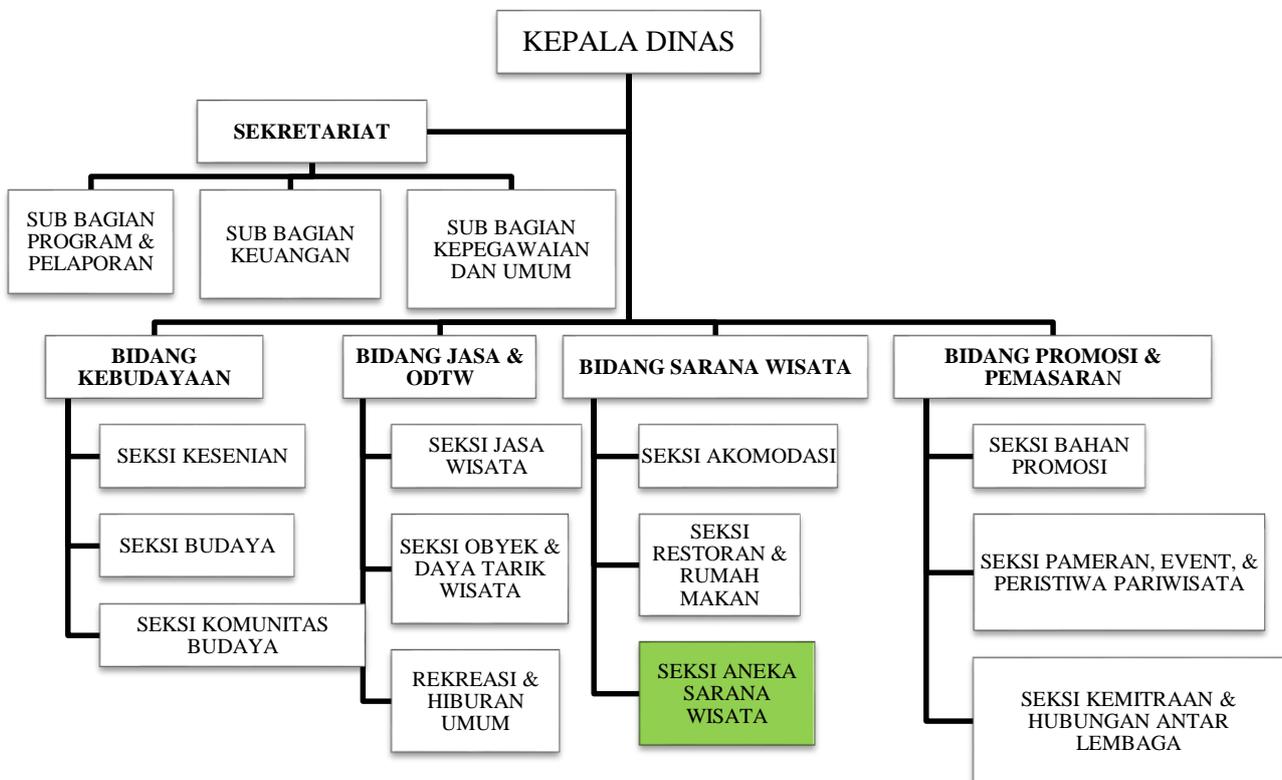
Dilihat dari struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bogor (Gambar

1), maka bagian yang bertanggung jawab dalam pengembangan ekowisata adalah Bidang Sarana Wisata, Seksi Aneka Sarana Wisata. Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya, maka Seksi Aneka Sarana Wisata mempunyai tugas antara lain:

- a) Menggali/mengembangkan kegiatan wisata, mencakup (i) Wisata tirta, (ii) Angkutan wisata, (iii) Kawasan wisata, dan (iv) ekowisata.
- b) Mengembangkan/membangun pariwisata berbasis masyarakat (desa-desa wisata), desa adat, desa kerajinan dan desa pertanian/perkebunan.

Secara spesifik, paling sedikit ada 5 rincian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Seksi Aneka Sarana Wisata di bawah Bidang Sarana Wisata sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis di bidang Aneka Wisata (Wisata tirta, pondok wisata, *homestay*, kawasan wisata dan angkutan wisata).
2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (ekowisata dan desa wisata).
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan pelayanan.
4. Melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis/ kriteria atau pedoman pembinaan.
5. Melaksanakan pengumpulan dan olah data.



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.

Upaya yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas kebudayaan dan pariwisata (DKP) Kabupaten Bogor, diketahui bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI) tersebut di atas, maka DKP telah mengambil paling tidak tiga langkah/kebijakan dalam pengembangan pariwisata. Ketiga rumusan langkah/kebijakan tersebut, meliputi:

- Peningkatan koordinasi antar *stakeholder* (birokrasi, pemangku Taman Nasional, TWA, BKSDA, Perum Perhutani dan Perguruan Tinggi, serta LSM dan pelaku usaha) dalam pengembangan ekowisata dan *Community Based Tourism* (CBT)
- Pengembangan produk ekowisata/CBT.
- Penyusunan dan strategi promosi ekowisata/CBT.

Mengacu pada langkah-langkah/kebijakan tersebut, DKP juga telah merumuskan rencana untuk melangkah-lanjuti upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

- Penyelarasan antara rencana program yang diajukan dengan dana APBD yang tersedia.
- Upaya peningkatan pemahaman tentang ekowisata dan pariwisata berbasis masyarakat di kalangan birokrasi.
- Menyiapkan upaya untuk segera terbentuknya Tim Koordinasi Ekowisata di daerah.

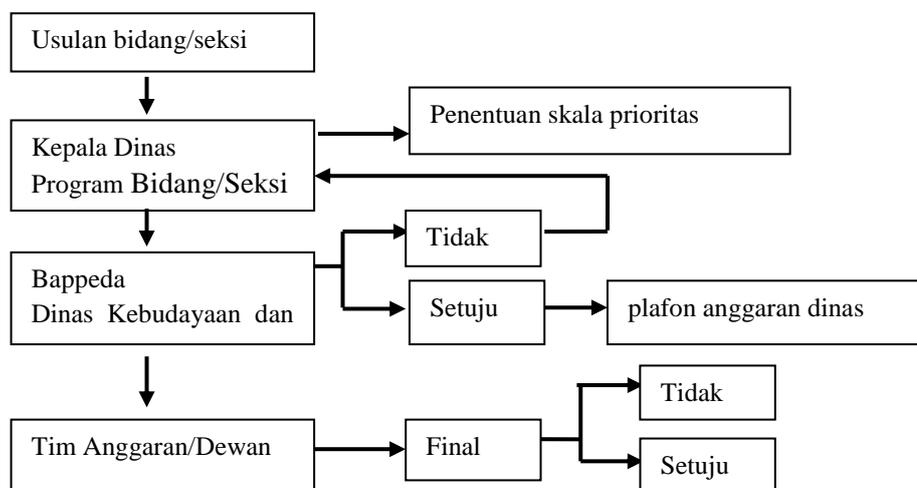
Meskipun langkah/kebijakan dan rumusan rencana tindak lanjut telah dilakukan, namun ternyata sampai saat pelaksanaan penelitian ini, ketiga rencana tersebut belum terealisasi secara nyata di dalam pelaksanaan kegiatannya. Hal ini terjadi terutama karena tidak adanya kesinambungan dukungan baik dari segi pengambil kebijakan maupun anggaran yang disediakan, padahal lazimnya suatu rencana kerja dapat dilaksanakan

apabila ada dukungan nyata dari berbagai pihak dan tersedianya dukungan anggaran yang cukup.

Permasalahan dan Kendala dalam Pengembangan Ekowisata

Hasil identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dalam melangkah-lanjuti rencana pengembangan ekowisata di Kabupaten Bogor, ditemukan paling tidak ada lima permasalahan atau kendala yang dipandang penting, sebagai berikut :

- Skema keuangan*. Fakta menunjukkan bahwa perumusan rencana ternyata tidak diikuti dengan penyediaan atau alokasi anggaran untuk pelaksanaan rencana tersebut. Akibatnya tidak ada kesinambungan antara rencana dan pelaksanaan kegiatan/program. Artinya apabila rencana yang telah disepakati namun tidak diikuti dengan pengusulan dan penyediaan anggarannya di dalam APBD, maka program atau kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana. Dengan kalimat lain skema keuangan atau penganggaran menjadi kendala utama dari berjalan atau tidaknya suatu rencana pengembangan pariwisata. Adapun skema usulan anggaran program/kegiatan pengembangan ekowisata seperti ditunjukkan pada Gambar 2.
- Persepsi para pihak*. Pemahaman ekowisata dan pariwisata berbasis masyarakat di kalangan birokrasi masih kurang. Oleh karena itu masih perlu dibangun dan disosialisasikan kepada para pihak tentang pembangunan pariwisata (filosofi), dan pembangunan pariwisata untuk mensejahterakan masyarakat (CBT). Persepsi yang tidak sama dari para pihak merupakan salah satu kendala yang menyebabkan penerimaan dan dukungan dari para pihak khususnya birokrat terhadap upaya pengembangan pariwisata menjadi rendah.



Gambar 2 Skema usulan anggaran program/kegiatan pengembangan ekowisata di Kabupaten Bogor.

- c) *Pasar*. Berkembangnya ekowisata antara lain sangat ditentukan oleh ada tidaknya pasar atau permintaan. Sejauh ini dapat dinyatakan bahwa informasi tentang pasar ekowisata di Kabupaten Bogor khususnya belum tersedia. Oleh karena itu diperlukan suatu studi khusus yang melakukan analisis pasar (*market analysis*) untuk mengetahui sumber pariwisata dan segmen pasar dari ekowisata atau pariwisata di Kabupaten Bogor.
- d) *Dukungan*. Belum atau tidak berjalannya rencana program/kegiatan pengembangan pariwisata karena rendahnya dukungan penganggaran dan fokus kebijakan khususnya untuk ekowisata dan pemberdayaan masyarakat.
- e) *Koordinasi*. Kurang adanya koordinasi antar stakeholder, dan jaringan ekowisata merupakan permasalahan atau kendala lain yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata.

Hubungan Antar Instansi dalam Pengembangan Ekowisata Kabupaten Bogor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DKP) Kabupaten Bogor sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata telah dan selalu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan ekowisata di Kabupaten Bogor. Beberapa cacatan di bawah ini dapat menjadi bukti tentang upaya membangun jaringan komunikasi yang sudah dilakukan oleh DKP, antara lain:

- a. *Daerah*. Dalam lingkup wilayah kerja di daerah, maka DKP Kabupaten Bogor telah melakukan upaya koordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan ekowisata di dalam lingkup wilayah Kabupaten Bogor. Koordinasi antara lain dilakukan dengan manajemen taman nasional, Perum Perhutani, Dinas Kehutanan dan perguruan tinggi.
- b. *Instansi/Kementerian lain*. Komunikasi juga dilakukan dengan instansi/kementerian lain dalam bentuk kegiatan Pelatihan Penyusunan Produk dan Strategi Promosi Ekowisata yang melibatkan pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP), TN Gunung Halimun Salak (TNGHS), dan Forum Ekowisata Jawa Barat dan Indecon.
- c. *Swasta/Dunia Usaha*. Komunikasi dan kerjasama juga dilakukan pihak DKP dengan pihak swasta/dunia usaha, antara lain dalam bentuk kegiatan Pelatihan dan Penyusunan Pariwisata Berbasis Masyarakat (desa wisata).
- d. *LSM (Lembaga Swadaya masyarakat)*. Kerjasama dengan LSM dilakukan dengan turut aktif dalam Forum Ekowisata seperti kegiatan Indecon, dan IEBF (*International Ecotourism Business Forum*) yang merupakan kalender tahunan.
- e. *Pihak-pihak lain*. Menggandeng Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Pancasila dalam

pengembangan Desa Wisata Taman Sari dan Tenjolaya, dan Desa Wisata Cisarua dan Leuwiliang.

Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan para pihak yang lain secara formal di tingkat teknis sampai pada saat penelitian ini dilaksanakan diketahui belum ada. Meskipun demikian, dalam tahapan proses untuk pengembangan ekowisata sebenarnya telah dilakukan upaya komunikasi dan koordinasi untuk membangun kesesuaian produk dan pasar ekowisata di daerah Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Selain itu juga telah dilakukan upaya untuk membangun pemahaman tentang ekowisata di kalangan birokrasi dan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terkait dengan sinergitas langkah/kebijakan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan instansi-instansi lain yang terkait dengan pengembangan ekowisata masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi formal maupun informal. Sinergitas langkah/kebijakan juga perlu dibangun secara informal dengan beberapa pihak lain yang memberikan perhatian dan/atau berperan aktif didalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bogor, seperti Forum Ekowisata, Indecon, IPB, *Bogor Tourism Community* (BTC) dll.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa secara umum peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap pengembangan pariwisata belum berjalan optimal. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi pada masa mendatang agar posisi atau status ekowisata didalam kerangka pembangunan diharapkan dapat menjadi salah satu fokus perhatian pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Bogor. Ini berarti bahwa harus ada upaya keras untuk menjadikan ekowisata sebagai salah satu prioritas pilihan program/kegiatan pembangunan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah melakukan peran-aktif untuk mengembangkan ekowisata Kabupaten Bogor pada khususnya, serta menjalin kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak.
2. Langkah-langkah/kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor harus disinergikan dengan langkah-langkah/kebijakan dari instansi (stakeholder) lain dalam upaya pengembangan ekowisata Kabupaten Bogor.
3. Ada beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Bogor, yakni: (a) tidak tersedianya skema keuangan (penggaran), (b) masih rendah atau tidak

sama persepsi para pihak, (c) pasar, (d) rendahnya dukungan para pihak dan koordinasi yang belum berjalan efektif.

4. Untuk meningkatkan upaya pengembangan ekowisata ke depan, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yakni: (a) Koordinasi dan kerjasama lebih intensif dengan para pihak/instansi lain, (b) penelitian lanjutan mengenai tata kelola ekowisata di Kabupaten Bogor sebagai dasar didalam melakukan perbaikan dan peningkatan tata kelola ekowisata yang baik (*Good Ecotourism Governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. 2010. Kebijakan dan aplikasi ekowisata di Kabupaten Bogor. Prosiding Workshop Tata Kelola Ekowisata 16 Agustus 2010. Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Kementerian Dalam Negeri. 2009. Permendagri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Muntasib, E.K.S. Harini. 2010a. Tata kelola ekowisata. Makalah disampaikan pada Workshop Tata Kelola Ekowisata 16 Agustus 2010 di Kampus IPB Baranangsiang. Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB).

Muntasib, E.K.S. Harini. 2010b. Mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan ekowisata Daerah (aplikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah). Makalah disampaikan dalam rangka “Bimbingan Teknis (Bintek) Pengembangan Ekowisata Daerah, 21-22 Juli 2010, dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Hotel Mirah Bogor.

Muntasib, E.K.S. Harini. 2010c. Mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan ekowisata daerah. Makalah disampaikan dalam Seminar “Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Sebangau: Sinergitas Mewujudkan Taman Nasional Sebangau sebagai Pintu Gerbang Ekowisata Kalimantan Tengah” tanggal 5 Agustus 2010, dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Sebangau di Hotel Aquarius Palangkaraya.